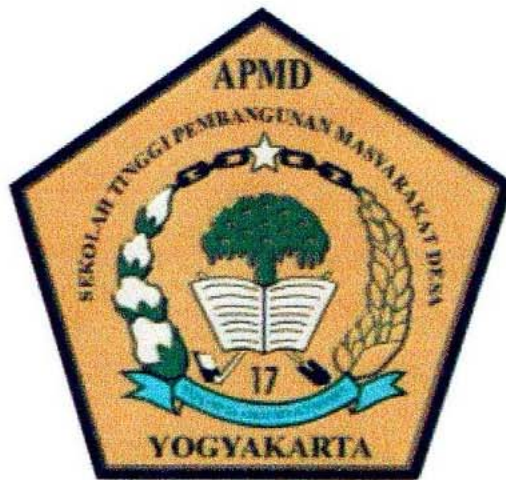


**KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD
TAHUN 2011-2015 MENGGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY***

*(Study Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur)*

SKRIPSI



Disusun Oleh:

KORNELIS KAPITAN

NIM: 13520116

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA

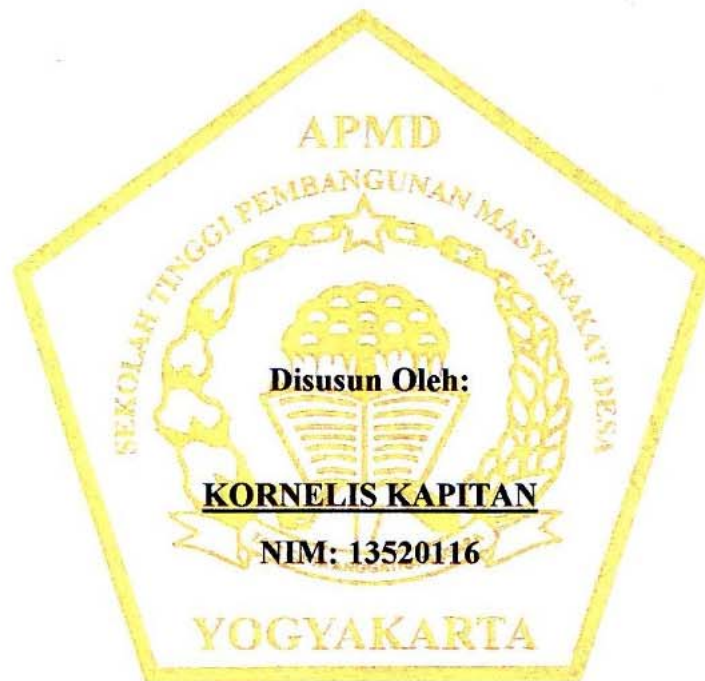


**KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD
TAHUN 2011-2015 MENGGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY***

*(Study Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur)*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Derajat Kesarjanaan
Jenjang Strata Stau (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan
Di STPMD "APMD" Yogyakarta



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

Y O G Y A K A R T A



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan Di depan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Juli 2017

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

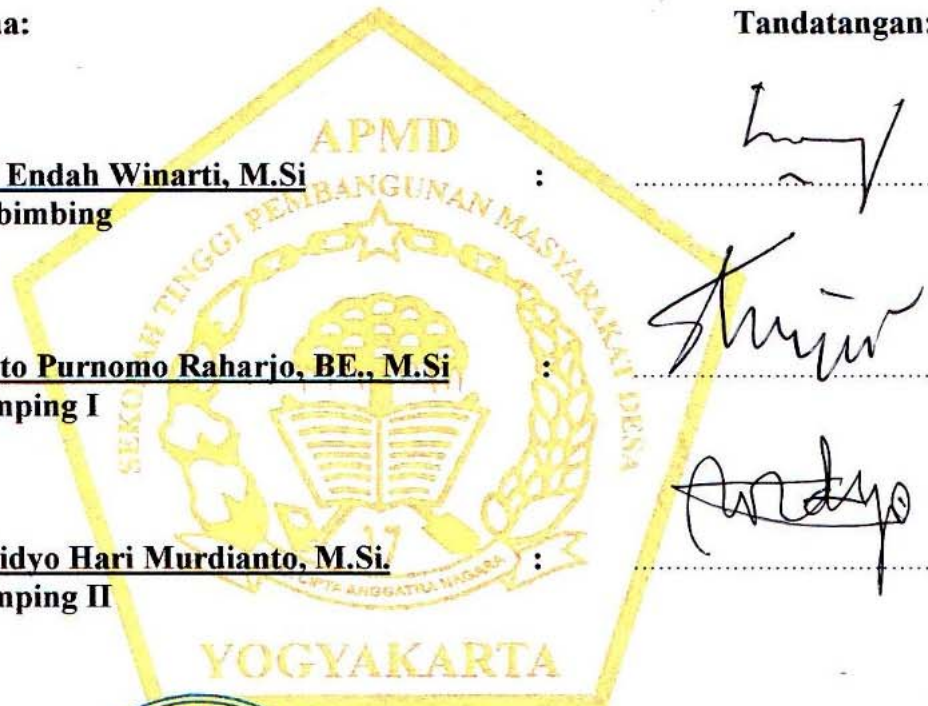
Nama:

Tandatangan:

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
Ketua/Pembimbing

Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si
Penguji Samping I

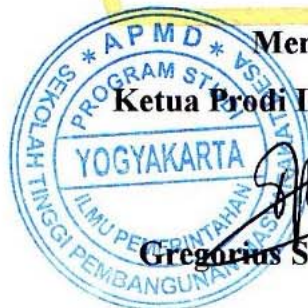
Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si
Penguji Samping II



Mengetahui:

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, MA.



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNANAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2017

M O T T O

"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu."

(Marcus Aurelius)

"Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai."

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur yang melimpah penulis ungkapkan kepada Allah pemberi hidup dan penerang akal,budi, serta perlindungan –Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi di Program Strata 1 (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

1. Bapa (Dominikus Duli Making) dan mama (Monika Muda) yang amat dicintai dan dikagumi penulis. Doa, tangisan motivasi dan finansial yang memanjakan penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih ema dan bapa....*budi mion go balas bisa hala,tuan lera wulan tana ekan be nedi pati mari*”.
2. Terima Kasih untuk yang selalu ada dalam hidup yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka calon Kekasihku Imakulata Gelu”No tidak bisa membalas ini semuanya Tuhan dan Lewo Tanah akan membimbing Kita Selamanya.Ibu- Ibu Bidan yang cantik- cantik Rumah Saakit Bukit Lewoleba sekali lagi rasa Syukur ini penulis ucapkan terimah kasih.
3. Terima Kasih untukmu Sedonku Elisabet Korbaffo Yang selalu menemani memberikan motofasinya,semoga bisa sama sepertimu harus kejar pasca serjana *“janji tu”making* dalam perjuangan pada awal hingga selesai studi ini,tepat pada waktunya Tuhanlah dan Lewo Tanah akan membalas semuanya.
4. Teman-Teman TALA IA yang membantu proses tumbuh kembangnya wawasan berorganisasi. Ka, Juprianus Lamablawa, Roman Making,yang

selalu memberikan kontribusi yang sinerjik, Raden Ama Raya, Amrid Lamablawa Sipri Making, Ka Epy Fanya Tede Making, Rusly Making, Hono Ganteng, Yustan Making , Ita Liliweri, Edmundus Dismas Ola Leuwerun, Adik yang cantik Mey Making, Kety Making, Mas Askil Purab,Kembar Langoday, Bence Maran (Reu yang Ganteng) Arnol Ganteng.

5. Bapak, Stefanus Jam Making, Bapak Lusius Loli Making, Bapak Rafael Suban Ikun, Om. Theodorus Lawe,Om, Bartolomeus Bosi Paliwala,Om Didakus Leba Purek ,Bapak, Lorens Laran Duli Making, Bapak, Herman Hola, Duli Making,Mama Theresia Koro Duli Making,Ade Asti Making,Amsi Making Ade Laurensius Kebesa, Kaka Ipar Latif Paukuma ,Kakaku Sovia Sura Duli Making, bersama Semua Keluarga Paokuma,Adik Aldo Making, Adik Benediktus Gesi (*Ingat Kulianya di Jogja eeee.....*) Abang Sisko Making, Tata Ose Duan,yang selalu kasih saya dorongan, Tata Udis Wolor, Tata Suster Novita Making,Tata Suster Albert (*senior yang selalu traktir saya dikantin*), Tata Suter Margareta Bitu Making (Saya wisudah tata punya oleh- oleh janji saya ke Bali tow dan harus direalisasikan eew saya tagi).
6. Keluarga Besar Duli Sesa,Atas semua Nilai Luhur yang ada di Lewolein.Tanta Dai ikun,Abang Jembo Ikun,Nene Plipus Lima, Nene Katarina Ketane Nene Petronela Making,Nene Bernadus Buku,Bapak Antonius Motong Making, Om Urbanus Use, Bibi Erni,Besa Dai Paliwala serta semua Keluarga. Terima Kasih untuk dukungan dan motivasi buat

penulis. Teman- Teman Gadis Crew (Mari belajar bersama dalam menempu masa Depan).

7. Organisasi- Organisasi : Ikatan Keluarga Ile Ae yogyakarta (IKALAYA) ,Alumni Ina TALA IA (Lembata), Lebatukan Comunity (LCY) ,Rumpun Mahasiswa Lamaholot “APMD”(RUMAH LAMA), Batu Tulis Nusantara Yogyakarta, Kelompok Studi Tentang Desa (KESA APMD) , Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (KOMAP APMD), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Yogyakarta (GMNI),Teman-Teman PMKRI,Cabang Yogyakarta ,yang mendidik dan membesarkan pemikiran penulis.
8. Kaka, Ferdi Burin, Opolake Sin Ikun dan Tanta Mey Ikun, Bapak Keapal Dinas Dispenda,Bpk Yunus Sape, serta seluruh Staf Dispenda Kabupaten Lembata yang membantu memperlancar kegiatan pengambilan data penelitian.
9. Semua pihak yang tidak disebutkan satu per satu, semua Jasa dan kebaikan hanyalah maha kuasa yang membalasnya.
10. Kaka, Ferdi Burin, Opolake Sin Ikun dan Tanta Mey Ikun, Bapak Keapal Dinas Dispenda,Bpk Yunus Sape, serta seluruh Staf Dispenda Kabupaten Lembata yang membantu memperlancar kegiatan pengambilan data penelitian. Semua pihak yang tidak disebutkan satu per satu, semua Jasa dan kebaikan hanyalah maha kuasa yang membalasnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang melimpah penulis ungkapkan kepada Allah pemeberi hidup dan penerang akal,budi, serta perlindungan –Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kinerja Pmerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD 2011-2015 Menggunakan Prinsip *Value for Money*” dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menjadi Derajat Serjana Ilmu Pemerintahan (S-I) Fakultas Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa”APMD” Yogyakarta. Penulis tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan hambatan dalam proses penulisan Karya tugas akhir ini. Penulis menyadari dukungan,bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak yang berkontribusi positif bagi penulis, untuk menghadapi tantangan,halangan,kesulitan selama menjalani proses dan tahapan – tahapan penulisan skripsi dan perkuliahan yang dijalani penulis. Dengan rendah hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Habib Mushin,S.Sos,M,Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa:APMD” Yogyakarta.
2. Dra.Safitri Endah Winarti,M.Si Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa:APMD” Yogyakarta Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan arahan serta motifasi yang tinggi sehingga samapi terselesaikanya skripsi ini.
3. Dosen Penguji samping 1(satu) Drs.Triyanto Purnomo Raharjo,BE,M.Si.
4. Dosen Penguji samping II (dua) Drs.YB.Widyo Hari Murdianto,M.Si yang telah menguji dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa:APMD” Yogyakarta.
6. Seluruh Staff dan karyawan-karyawati Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa:APMD” Yogyakarta.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 5 Juli, 2017

Penulis,

Kornelis Kapitan

SINOPSIS

Kinerja pada sektor publik dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu Organisasi atau daerahnya dalam mencapai tujuan. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan. Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme sektor publik dapat dinilai dengan konsep *Value For Money* dalam menjalankan APBD. Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (*DPPKAD*), sebagai organisasi sektor publik dalam hal kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD, masih belum efisien, karena dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih belum mencapai ekonomis, efisien, dan efektif. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD 2011-2015, menggunakan prinsip *Value For Money* di Kabupaten Lembata. Lokasi dalam Penelitian ini adalah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (*DP-PKAD*) Kabupaten Lembata yang berlokasi di Jln. Trans Lembata. Metode pengumpulan data menggunakan data dokumentasi, observasi dan wawancara. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain rasio ekonomis Kabupaten Lembata dari tahun 2011-2015 cukup konsisten berada pada kategori ekonomis, dalam penyerapan anggaran dalam prioritas program-program ditahun yang bersangkutan ada SKPD yang sudah, dan ada yang belum dijalankan atau terserap secara keseluruhan, tetapi dalam kemampuan secara anggaran bisa untuk menjalankan program-program tersebut, Walaupun terjadi fluktuasi presentase pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan 3,35 dari 80, 70 % menjadi 84,05 %. Tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 90,27 % dan pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali sebesar 0.66 menjadi 89,61 %. Rasio efisiensi pada Kabupaten Lembata periode tahun 2011 hingga tahun 2013 semakin mengalami peningkatan. Tahun 2011 rasio efisiensi kabupaten Lembata menunjukkan 98,64%, tahun 2012 menunjukkan 97,70%, tahun 2013 menunjukkan 99,84% dan pada tahun 2014 adalah 87,01%. Menuju ke tahun 2015 mengalami peningkatan 96,87%. Efisiensi yang dimaksudkan bahwa dalam penyerapan anggaran dalam tahun yang bersangkutan, ada program-program yang belum terealisasi menurut tingkat penyerapan dalam realisasi belanja dan efisiensi berada pada kategori efisien, walaupun pada tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan berada pada 87,01%. Perkembangan efektifitas dalam penyerapan anggaran pemerintah daerah jika dilihat dari rasio efektifitas mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2010 menunjukkan kinerja pemerintah termasuk kategori cukup efektif, karena realisasi pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendapatannya. Namun pada tahun 2012 hingga tahun 2015 kinerja pemerintah mengalami penurunan dan berada pada kategori tidak efektif yaitu sebesar 99,86 %, 99,24 % dan 98, 52 %. Artinya pemerintah daerah Kabupaten Lembata dalam proses untuk tingkat penyerapan anggaran dalam prioritas-prioritas program-program sudah mengalami peningkatan untuk setiap SKPD berhasil memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif.

Kesimpulan hasil penelitian yang dapat diambil dari kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD2011-2015, menggunakan prinsip *Value For Money*. Hasil Perhitungan tiga rasio ekonomis, efisien adalah baik, sedangkan rasio Efektivitasnya hasilnya kurang baik, Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan tersebut diatas diantaranya, Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (*DPPKAD*), harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam kinerjanya sehingga *output* dalam penyerapan APBD, sehingga mayoritas program-program dapat terlaksana dengan baik, sehingga efektivitasnya dapat ditingkatkan.

Kata kunci: *Value For Money (Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas)*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
SINOPSIS.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
D.1. Kegunaan Teoritis	12
D.2. Kegunaan Praktis	12
E. Kerangka Teori.....	12
E. 1. Pengertian Pemerintah Daerah	12
E. 2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	23
E. 2. 1. Struktur APBD	25
E. 3. Kinerja pemerintah Daerah	26

E. 3. 1. Pengertian kinerja	28
E. 3. 2. Pengukuran kinerja	33
E. 3. 3. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Pada Era Reformasi	36
E. 4. Pengertian prinsip <i>Value for Money</i>	37
E. 5. Pengukuran Kinerja berdasarkan Prinsip <i>Value for Money</i> ...	40
F. Ruang Lingkup	44
G. Metode Penelitian	44
G. 1. Jenis Penelitian.....	44
G. 2. Metode Penelitian	45
G. 3. Objek Penelitian.....	46
G. 4. Subjek Penelitian.....	46
G. 5. Sumber dan Jenis Data	47
G. 6. Lokasi Penelitian.....	47
H. Teknik Pengumpulan Data.....	47
H. 1. Analisis Data.....	48
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Kondisi Umum Daerah	49
B. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Lembata	61
BAB III ANALISIS DATA.....	72
A. Deskripsi Informan	72
B. Analisis Data	75
B.1. Kinerja Pemerintah Daerah.....	75

B.2. <i>Valeu for money</i> (Efisien, efektif, ekonomis)	77
B.3. Analisis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	
Daerah	81
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak digulirkan kebijakan Otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, cukup banyak permasalahan yang muncul terhadap implementasi kebijakan ini. Pemerintah pusat melakukan revisi kebijakan Otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua kebijakan ini juga mengatur hal yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Sejalan dengan perlu dilakukannya reformasi sektor publik, diawal periode Otonomi daerah telah keluar sejumlah Peraturan Pemerintah sebagai operasionalisasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dengan Peraturan Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, khususnya pengelolaan keuangan daerah.

Tuntutan akan kualitas dan profesionalisme sektor publik dapat dinilai dengan prinsip *Value for Money* (Nilai daripada uang) dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik untuk menciptakan good publik and akuntabilitas(Mardiasmo,

2002:27). Model *Value for Money* atau yang dikenal dengan model 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas), mengukur dengan analisis varian yakni membandingkan antara input dan output yang direncanakan dengan input dan output aktual dan ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana (Mardiasmo, 2002:27). *Value for money* dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (publik money) yang mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan-undangan.

Amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti UU No. 32 Tahun 2004, Daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan

potensi daerahnya. APBD yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah diberi kewenangan mengurus pembiayaan dalam mengelola dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah. Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut agar lebih ekonomis, efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Oleh karena itu kedua aspek dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*. Pemberian otonomi yang luas dapat membuka jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan daerahnya yang berorientasi pada kepentingan publik yang memperhatikan keadilan dan kepatuhan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD yang baik, secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembanguann daerahnya dan pelayanan kepada masyarakat. Halim (2001: 125) menjelaskan bahwa ciri dari suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan daerah, yang artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan

keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Adapun pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja pemerintah daerah merupakan suatu evaluasi instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang mana mempunyai prinsip (*value for money*), nilai dari pada uang, dalam menjalankan aktivitasnya dalam akuntansi sector public yang mendasari tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisien dan efektivitas. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. (Mulyadi, 2007).

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Lembata dalam mengelolah keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, ekonomis mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran

kinerja yang baik. Pada sektor publik dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi publik dalam pencapaian tujuan. Tujuan yang telah dicapai nantinya akan dinilai sebagai bahan penilaian kinerja. (Mardiasmo, 2002:299).

Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa depan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Penilaian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan menciptakan mekanisme *rewards and punishment*. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama ini sulit untuk dilakukan secara objektif, kesulitan ini disebabkan disusnya sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi (LAN. 2000:1).

Hak otonomi kepada masing- masing daerah atau kabupaten yang ada di Indonesia `termasuk di Kabupaten Lembata akan memeberikan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatanya, demi kesejatraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah sesuaidengan hasil yang telah dicapai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berpikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga- lembaga sektor publik. Akuntansi bukan hanyasekedar kemampuan lembaga sektor publik menunjukan bagaimana uang publik tersebut digunakan, tetapi

juga meliputi kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen yang baik. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 perubahan menjadi Peraturan Menteri DalamNagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegritas yang diwujudkan dalam anggaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tentang prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah melalui sistem akuntansi pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan (Manik, 2013). Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan ini menyadarkan kita masyarakat akan perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik. *Value for*

money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu: ekonomis, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo. 200: 4).

Prinsip *value for money* dalam rangka pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya yang bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan akuntabilitas tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Aparat birokrasi diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pengayoman kepada masyarakat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat (Mulyadi, 2007).

Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lembata memiliki pola yang jelas dan jumlah anggaran yang semakin besar. Tahun anggaran 2013 dan 2014, prioritas APBD adalah meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan tahun 2015 diarahkan pada peningkatan pembangunan infrastruktur untuk memacu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Derajat desentralisasi fiskal atau kemandirian daerah Kabupaten Lembata selama tahun 2011 sampai pada tahun 2015 masuk dalam kategori

sangat kecil dengan rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 4, 89% per tahun dan masih bersifat fluktuatif atau belum stabil dan belum menunjukkan *trend* yang meningkat. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi rata-rata sebesar 86, 24% per tahun untuk dana perimbangan dan sebesar 8, 87% untuk lain-lain pendapatan daerah. Oleh karena itu maka ke depan pemerintah daerah Kabupaten Lembata perlu mengelola belanja daerah yang lebih ekonomis, efektif dan efisien.

(Sumber DPPKAD Kabupaten Lembata Tahun 2016 (diolah)).

Laju kenaikan pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten Lembata memang berbanding lurus dengan kenaikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Manajemen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata melakukan perbaikan pada sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Jumlah anggaran pendapatan yang semakin besar memudahkan penyediaan anggaran belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Pada tahun 2013, kebutuhan belanja daerah sebesar Rp. 471. 835. 625. 997. 00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 269. 743. 313. 197. 00 dan belanja langsung sebesar Rp. 244. 686. 720. 902. 00.

(Sumber DPPKAD Kabupaten Lembata Tahun 2016 (diolah)).

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus lebih memperhatikan disiplin anggaran, baik pada saat akan memulai pelaksanaannya maupun pada akhir masa pelaksanaannya. Disiplin anggaran tersebut merupakan salah satu cara untuk menghindari *booming* pencairan anggaran dan penyelesaian tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus direncanakan sebaik-baiknya sesuai dengan anggaran kas dan *time schedule* pelaksanaannya agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah masih bersifat fluktuatif dengan kecenderungan yang selalu menurun dengan rata-rata pencapaian sebesar 15, 99% per tahun. Pendapatan Asli Daerah dimaksud, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen lain- lain Pendapatan asli daerah yang sah dengan rata-rata perumbuhan 32, 53% per tahun dan pertumbuhan terendah ada pada komponen hasil retribusi hanya sebesar 8, 27% per tahun. (*Sumber:Dinas Pendapatan- PKAD Kabupaten Lembata (2016) data diolah*). Melihat rendahnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah daerah harus memperbaiki optimalisasi sumber-sumber pajak harus ditingkatkan dan fasilitas publik terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Belanja pemerintah daerah yang efisien dan efektif akan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan suatu daerah atau wilayah. Berapapun besarnya akan menjadi kurang bermakna apabila pola belanjanya masih terjadi pemborosan-pemborosan dan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat. Disamping itu, bagi daerah yang masih tertinggal seperti kabupaten Lembata belanja pemerintah mempunyai peranan yang cukup krusial sebagai stimulus atau pendorong pembangunan ekonomi lokal. Untuk mendapatkan efek positif yang optimal bagi perekonomian daerah maka diperlukan suatu sistem perencanaan belanja pemerintah yang baik dan tepat sasaran. Sebagaimana

diketahui bahwa sesungguhnya desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia adalah desentralisasi pada sisi pengeluaran. Hal ini berarti dengan anggaran yang begitu besar yang telah ditransfer ke daerah akan dikelola oleh daerah dengan diskresi atau kewenangan yang sangat luas dalam penggunaannya sehingga belanja pemerintah daerah dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam belanja pemerintah secara nasional. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional dan perekonomian nasional juga akan dipengaruhi oleh pola belanja daerah, maka pengelolaan belanja daerah yang efisien dan efektif haruslah menjadi fokus perhatian dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah Kabupaten Lembata.

Perbandingan antara realisasi belanja daerah terhadap target yang telah ditetapkan rata-rata sebesar 87, 10% selama kurun waktu 2011 sampai tahun 2015. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya kinerja pengelolaan belanja daerah yang belum ekonomis, efisiensi dan efektifitas terutama dari sisi penyerapan anggaran program, dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya tidak terlaksana secara optimal yang berarti pula bahwa proses pembangunan tidak bisa berjalan secara optimal. Untuk belanja tidak langsung, perbandingan antara target yang telah ditetapkan terhadap realisasi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 rata-rata sebesar 92, 88% yang menunjukkan angka capaian cukup baik dengan capaian tertinggi pada tahun 2012 sebesar 98, 62% dan terendah pada tahun 2014 dengan capaian 83, 52%. Sedangkan untuk belanja langsung perbandingan antara target dan realisasinya rata-rata sebesar 80, 22%, dimana kinerja realisasi tertinggi pada tahun 2013 sebesar 86, 16% dan terendah pada tahun 2015 dengan

capaian sebesar 75, 7%. (Sumber:Dinas Pendapatan -PKAD Kabupaten Lembata (2016), data diolah.

Masyarakat tentunya menghendaki adanya pelaksanaan kinerja sektor publik yang baik termasuk,kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam pengelolaan keuangan daerahnya harus sesuai dengan azas keadilan dan pelayanan public yang efektif. Apalagi Kabupaten Lembata yang sekarang merupakan salah satu daerah wisata, pasti akan selalu dituntut untuk memeberikan pelayanan jasa yang baik dalam mendukung kinerja pemerintahan dalam memajukan serta mengembangkan potensi daerahnya dalam menggunakan prinsip *value for money*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD menggunakan prinsip *value for money (Efektif, Efisien, dan ekonomis)*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan Kinerja Pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD menggunakan prinsip *Value For Money*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Sri. 2010. *Pengukuran Kinerja Dengan Prinsip value for Money Pemerintahan Kota Batu*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor di Indonesai*. BPFE: Yogyakarta.
- Elitian, L. 2001. "Strategi Mendongkrak Kualitas Pelayanan" *Jurnal ekonomi STEI, No. 15/Th. X/ Januari-Maret*.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Kurrohman, Taufik. 2013. *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money*. Universitas Jember.
- Mahmudi. 2007. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2004. *Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Edisi ke-2. LAN: Jakarta.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Kirana Jaya, W. 2006. *Pengelolaan Keuangan daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Sistem Informasi.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas public Melalui Akuntansi sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol 2 No. 1.
- Mardiasmo, Prof. DR. Mba. AK. 2009. *Akuntansi Sektor Publik* ANDI: Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodelogi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Bandung.
- Nasution. 2004. *Metode Research; Penelitian Ilmiah: Penelitian Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Angetet*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purnama, I Desak made Ita, Dkk. 2014. *Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money. Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*.

Widiana, Hestiana Hari. 2005. *Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard*. Universitas Brawijaya Malang.

Yuanda, Angel. 2007. *Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Menggunakan Pendekatan Value For Money* (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Blitar) Universitas Muhammadiyah Malang.

Undang-undang Nomor .23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 4 tentang, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

<http://www.djpk.depkeu.go.id>